



**::PILWALI KOTA YOGYAKARTA 2017**

## Dua Petahana Siap Kalah



*"Saya mengajak warga untuk berdemokrasi dengan baik, apapun hasilnya siap dan menerima dengan ikhlas."*

**IMAM PRIYONO**

Calon Wali Kota  
Nomor Urut 1

DUA petahana yang sama-sama maju sebagai calon wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Imam Priyono - wali kota dan wakil wali kota periode 2011-2016-berkomitmen menunjukkan contoh berdemokrasi yang baik bagi masyarakat. Keduanya siap menerima apapun hasil Pilwali Kota Yogyakarta 2017 dengan legawa.

"Saya mengajak warga untuk berdemokrasi dengan baik, apapun hasilnya siap dan menerima dengan ikhlas. Percayalah masalah hasil itu pasti yang terbaik untuk kita semua," kata calon wali kota nomor urut 1, Imam Priyono, kemarin.

Dia mengaku tak ada persiapan khusus di hari terakhir jelang pemungutan suara. Kemarin, dia mengisi waktunya dengan silaturahmi keluarga dan teman-temannya. "Yang pasti berdoa,

mendekatkan diri kepada Allah SWT," ujarnya yang juga mengajak seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan pilwali yang santun dan berbudaya.

Pendampingnya, calon Wakil Wali Kota, Achmad Fadli, sejak akhir pekan kemarin melakukan ibadah umroh di Tanah Suci. Fadli tidak memiliki hak pilih karena berstatus warga Sleman.

Imam sendiri akan menggunakan hak pilihnya di TPS 18 Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen. "Sebelum berangkat ke TPS, saya akan berkunjung ke rumah orang tua dulu untuk mohon doa restu," imbuh Imam.

Sementara, calon wali kota nomor urut dua, Haryadi Suyuti kemarin bersilaturahmi ke kediaman orang tuanya di Demangan Baru, Depok, Sleman.

Ke Hal 11))



*"Semoga Kota Yogyakarta mendapat takdir yang terbaik. Saya sepakat nekmenang ora umuk, nek kalah ajang amuk."*

**HARYADI SUYUTI**

Calon Wali Kota  
Nomor Urut 2

# Dua Petahana Siap Kalah

(dari Hal 1

Haryadi memohon doa restu dan mengungkapkan niatnya maju pilwali sebagai proses ibadah.

Haryadi juga siap legawa menerima apapun hasil Pilwali 2017. "Semoga Kota Yogyakarta mendapatkan takdir yang terbaik. Saya sepekat nek menang ora umuk, nek kalah aja ngumuk. Kontestasi untuk masyarakat adalah masyarakat," janji Haryadi.

Haryadi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas, aman, dan tertib. Hal sama dinyatakan pasangannya, calon wakil wali kota, Heroe Poerwadi. Heroe memarahkan hasil pilwali nanti kepada Allah SWT. "Siap menang, siap kalah, dan optimis menang," kata Heroe.

Haryadi akan menggunakan hak pilih di TPS 13 Muja Muja, Umbulharjo. Sedangkan Heroe tidak memiliki hak pilih karena ber-KTP Sleman. Namun sesuai rencana, Heroe akan mendampingi politikus PAN yang kini duduk di kursi DPR, Hanafi Rais, di TPS Prenggan, Kotagede.

Warga Mutasi Keluar Tak Terima Formulir C6  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta telah mendata warga mutasi kependudukan keluar kota pascapenetapan Daftar Pemilih Tetap

(DPT) Pilwali Yogyakarta 2017. "Ada 1.140 orang yang mutasi ke luar kota dan 468 warga yang meninggal dunia. Kami sudah siapkan langkah antisipasi agar tak ada penyalahgunaan hak pilih oleh pihak tertentu saat hari pemungutan suara besok (hari ini, Rabu)," ucap Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyo, kemarin.

Antisipasi yang dimaksud adalah memerintahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk tidak menyerahkan formulir C6 atau undangan memilih ke alamat rumah ribuan warga yang pindah kependudukan dan meninggal dunia. Selain itu, di hari pemungutan suara, petugas di tempat pemungutan suara (TPS) juga diminta teliti mendata warga yang hendak masuk bilik suara. Mengingat KPU tidak menghapus daftar warga mutasi dari DPT karena tak ada ketentuan yang mengaturnya.

"Data sudah kami sampaikan ke petugas penyelenggara di bawah, agar C6 tak jatuh ke tangan orang tak berihak. Data itu juga sebagai bahan untuk mengecek warga yang datang ke TPS," papar Wawan.

KPU juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) membuka layanan verifikasi data kependudukan saat hari pemungutan suara guna mengantisipasi pemalsuan

dokumen kependudukan. Sementara, hingga pukul 16.00 WIB kemarin, atau batas akhir Dindikcapil menerbitkan surat keterangan (suket) bagi pemilih tambahan Pilwali Yogyakarta 2017, tercatat ada penambahan 51 orang. "Semim (13/2) hingga Selasa (14/2) sore, data mutasi penduduk yang pindah atau mutasi keluar kota ada 27 orang. Untuk yang datang masuk ke kota sebanyak 51 orang," sebut Kepala Dindikcapil, Kota Yogyakarta, Sisruwadi, kemarin.

Diakutinya, mereka telah menerbitkan suket bagi 51 warga penduduk baru tersebut sebagai syarat untuk mencoba. Sementara layanan verifikasi data kependudukan di hari pemungutan suara mulai pukul 07.00-13.00 WIB.

Jalurannya, lanjut dia, petugas TPS yang menemukan kecurigaan dokumen kependudukan warga, sebelum masuk bilik suara bisa mengajukan permintaan verifikasi melalui aplikasi WhatsApp ke KPU untuk diteruskan ke Dindikcapil. "Kami sudah koordinasi dengan Kemendagri agar jalur online data kependudukan diperkuat untuk proses verifikasi," cetusnya.

## Warga Tak Berani Laporkan Politik Uang

Di sisi lain, tim pemenangan kedua calon peserta Pilwali 2017 khawatir praktik politik uang sulit diungkap.

Sebab, dalam Undang-Undang (UU) No. 10/2016 tentang Pilkada, pihak pemberi dan penerima sama-sama terancam sanksi. "Agar politik uang bisa diproses harus ada alat buktinya, salah satunya adalah uang. Tapi bagaimana warga berani melaporkan kalau syaratnya dia harus menerima uang lebih dulu yang berarti dia sebagai penerima dan terancam hukuman," ungkap Ketua Tim Pemenangan Insam Priyono-Achmad Fadli, Danang Rudiyatmoko, kemarin.

Pihaknya pun telah konsultasi ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Yogyakarta dan Bawaslu DIY, terutama menyangkut Pasal 187A. Pihaknya mengusulkan agar ada jaminan dan perlindungan bagi warga penerima yang berani melapor.

"Penerima ini nanti statusnya saksi pelapor atau whistle blower. Mereka perlu ada perlindungan karena jika tidak pastinya mereka tak berani melapor," tuturnya.

Keluhan senada disampaikan, Ketua Organizing Committee Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, Fachrudin. "Adalah peluang praktik politik uang dan prinsip 'uber' dalam UU Pilkada tersebut," ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasinya dengan mengarahkan tim ke tiap wilayah untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Meski dia-

kannya OTT politik uang sulit dilakukan.

Terpisah, Ketua Panwas Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin juga mengakui ada kendala dalam pengungkapan kasus politik uang. Menurut dia, sesuai UU Pilkada, pihak pemberi dan penerima memang harus diproses.

"Yakendalanya di situ, tapi kami mendorong para pihak berani melapor. Tak harus si penerima yang melapor, pihak lain yang melihat atau yang mendengar bisa melapor asal-kon memiliki bukti," ujarnya.

Polda DIY kerahkan 530 personel untuk mem-backup pengamanan TPS di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Sebagai bantuan, personel yang ditempatkan tersebut nantinya melengkapi personel dari Polres Kulonprogo dan Polresta Yogyakarta.

Kapolda DIY Brigjen Polisi Ahmad Dofiri menyebutkan, pemungutan suara di DIY akan diselenggarakan di 1.731 TPS. Jumlah tersebut terdiri dari 794 di wilayah Kota Yogyakarta dan 937 TPS di Kabupaten Kulonprogo. "Seluruh jajaran siap untuk melakukan pengamanan. Saya tegaskan kepada anggota untuk menjaga integritas dan netralitas Polri," ucap Dofiri saat apel di halaman Mapolda DIY, kemarin pagi.

anafi/ha deva

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005